



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA TW I

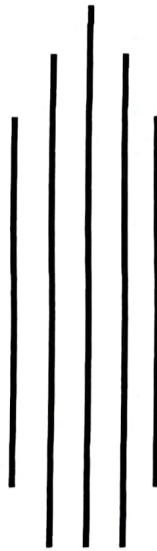
Tahun 2024



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
HASIL RENJA PD
TRIWULAN I TAHUN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, bimbingan dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ini merupakan laporan evaluasi hasil renja 2024 per triwulanan yang disusun untuk mengevaluasi hasil renja perangkat daerah baik berupa capaian kinerja dan keuangan dan merupakan capaian kinerja yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi perumusan kebijakan sehingga Renja Perangkat Daerah secara lengkap memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, target kinerja dan pagu indikatif.

Dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisan, penyajian dan substansi materinya, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Demikian laporan hasil pengendalian dan evaluasi disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Bumi Serumpun Sebalai.

Pangkalpinang,

April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,**


DARLAN S. Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19691206 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		2
BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Maksud dan Tujuan	3
	1.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	4
	1.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	4
BAB II	EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA	7
	2.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah Terhadap Program/Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2. Laporan Kemajuan Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024	8
BAB III	KENDALA DAN TINDAK LANJUT	25
	3.1. Kendala	25
	3.2. Tindak Lanjut	25
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	26

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk menjamin bahwa Renja Perangkat Daerah telah menjabarkan Renstra Perangkat Daerah dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi hasil renja. Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan berupa anggaran kas (angkas) yang dibagi setiap triwulan.

Evaluasi hasil renja Perangkat Daerah baik berupa kinerja dan keuangan merupakan capaian kinerja yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja OPD tahun berikutnya. Sistem pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh, untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan pengendalian dan evaluasi hasil renja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi pengeluaran keuangan antara aliran kas perangkat daerah per triwulan dengan realisasi anggaran per triwulan.
- b. Mengetahui capaian kinerja dan keuangan per triwulan;
- c. Menemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi anggaran per triwulan berdasarkan target pengeluaran yang ada di aliran kas perangkat daerah.

Tujuan Laporan pengendalian dan evaluasi hasil renja perangkat daerah adalah tercapainya pengendalian dan evaluasi hasil renja perangkat daerah dan kesesuaian antara target dengan capaian kinerja dan keuangan sehingga akuntabilitas kinerja perangkat daerah semakin maksimal.

1.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam Anggaran Perubahan 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan tujuan yaitu meningkatnya investasi dengan sasaran yaitu meningkatnya realisasi investasi.

1.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam Mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan strategi beserta program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada anggaran perubahan 2024 terdiri dari 6 Program, 18 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPMPSTSP melalui pelayanan kesekretariatan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - Pengadaan Mebel ;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu

- Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan sub kegiatan yaitu :
- Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi;

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Yaitu :

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
- Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan yaitu;

- Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
- Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

dengan sub kegiatan yaitu :

- Pengawasan Penanaman Modal;
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya;
- Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha;

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Selain hal tersebut diatas, DPMPTSP juga memiliki UPT PPT wilayah Belitung dengan 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan :
- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

Dalam APBD Tahun 2024 pagu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebesar Rp.13.554.136.615,00 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp.8.316.248.119,00 dan Belanja Barang jasa sebesar Rp.4.223.174.596,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.1.014.713.900,00 sehingga total pagu sebesar Rp.13.554.136.615,00

Dalam Tahun 2024 DPMPTSP mempunyai target dari penerbitan perizinan dan non perizinan adalah sebesar 925 izin dan non perizinan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, realisasi Belanja sebesar Rp.2.764.601.144,- atau sebesar 20,40%. Untuk izin yang telah dikeluarkan adalah sebanyak 144 (s.d Februari 2024) izin dan non perizinan atau 15,57% dari target.

2.1. Perbandingan antara Program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah terhadap Program/Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah .

Tabel 2.1.
Perbandingan Program Kegiatan Dalam Renstra dan Renja DPMPTSP

No	Program/Kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah TA. 2024	No	Program/Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah TA. 2023-2026
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Kegiatan:		Kegiatan:
	- Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah		- Administrasi Umum Perangkat Daerah
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Kegiatan:		Kegiatan:

	- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi		- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		- Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
3.	Program Promosi Penanaman Modal	3.	Program Promosi Penanaman Modal
	Kegiatan:		Kegiatan:
	- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Kegiatan:		Kegiatan:
	- Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		- Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		- Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		- Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Sumber : Data diolah

2.2. Laporan Kemajuan Kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024

Tabel. 2.2
LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d TW I		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Anggaran mendahului	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
				(%)	(Rp)	(%)	Rp	%		
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.959.392.339,00		25 %	3.742.568.228,00	25	2.606.988.459	23,79		
2 18 01 1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.047.400,00		50	47.860.500,00	50	11.317.876,00	11,43	-	-
2 18 01 1,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.086.900,00		45	45.400.000,00	45	11.317.876,00	12,43	-	-
2 18 01 1,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.960.500,00		57	2.460.500,00	57	0,00	0	-	-
2 18 01 1,02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.316.248.119,00		25	3.345.140.529,00	25	2.376.911.733,00	28,58		
2 18 01 1,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.316.248.119,00		25	3.345.140.529,00	25	2.376.911.733,00	28,580		
2 18 01 1,05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.000.000,00		25	19.000.000,00	0	1.000.000,00	1,41		
2 18 01 1,05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	71.000.000,00		25	19.000.000,00	2	1.000.000,00	1,41		
2 18 01 1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.288.020,00		25	122.981.868,00	25	39.248.078,00	7,18	-	-

2 18 01 1,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.230.100,00		0	0,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,06 01 UPTD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.999.600,00		25	3.249.900,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.997.100,00		25	10.000.000,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,06 02 UPTD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.999.200,00		25	4.499.760,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.992.200,00		0	0,00	0	00,0	0	-	-
2 18 01 1,06 03 UPTD	Penyediaan Peralatan rumah Tangga	15.000.000,00		0	4.176.100,00	0	00,0	0	-	-
2 18 01 1,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.999.100,00		25	6.500.000,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,06 04 UPTD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.997.200,00		25	866.150,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.999.620,00		25	5.000.000,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,06 05 UPTD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.600,00		25	4.999.903,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00		25	7.500.000,00	0	0,00	0	-	-

2 18 01 1,06 06 UPTD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.960.000,00		25	1.240.003,00	17	760.000,00	0	-	-
2 18 01 1,06 07	Penyediaan Bahan/Material	76.632.800,00		25	20.055.200,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,06 07 UPTD	Penyediaan Bahan/Material	14.999.500,00		25	3.749.875,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.500.000,00		25	12.750.000,00	25	6.569.000,00	11,42	-	-
2 18 01 1,06 08 UPTD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.500.000,00		25	4.375.003,00	25	2.475.000,00	14,14	-	-
2 18 01 1,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.000.000,00		25	30.000.000,00	25	27.533.407,00	44,41	-	-
2 18 01 1,06 09 UPTD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.000.000,00		25	4.000.000,00	25	1.910.671,00	11,94	-	-
2 18 01 1,06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	20.482.000,00		0	0,00	0	0,00	0		

2 18 01 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	945.231.900,00		0	0,00	0	0,00	0		
2 18 01 1,07.05	Pengadaan Mebel	122.496.800,00		0	0,00	0	0,00	0		
2 18 01 1,07.05 UPTD	Pengadaan Mebel	33.130.200,00		0	0,00	0	0,00	0		
2 18 01 1,07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	675.036.300,00		0	0,00	0	0,00	0		
2 18 01 1,07.06 UPTD	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	114.568.600,00		0	0,00	0	0,00	0		
2 18 01 1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.189.894.000,00		25	246.133.006,00	25	239.920.943,00	20,16		
2 18 01 1,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00		25	1.527.000,00	25	550.000,00	3,67	-	-
2 18 01 1,08 01 UPTD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.994.000,00		25	2.506.000,00	25	405.000,00	4,05	-	-
2 18 01 1,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000,00		25	37.500.000,00	25	30.231.443,00	17,280	-	-
2 18 01 1,08 02 UPTD	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00		25	6.500.000,00	0	5.734.500,00	22,06	-	-
2 18 01 1,08 04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	700.000.000,00		25	157.500.000,00	0	142.100.000,00	20,30	-	-
2 18 01 1,08 04 UPTD	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	263.900.000,00		25	40.600.000,00	0	60.900.000,00	23,08	-	-
2 18 01 1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.330.800,00		25	87.413.500,00	4	16.525.714,00	3,43		

2 18 01 1,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.850.000,00		25	13.350.000,00	12	6.650.000,00	10,25	-	-
2 18 01 1,09 01 UPTD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.000.000,00		25	3.250.000,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.962.000,00		25	10.100.000,00	12	2.350.000,00	3,36	-	-
2 18 01 1,09 02 UPTD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.600.000,00		50	25.453.000,00	10	5.750.714,00	8,38	-	-
2 18 01 1,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.920.000,00		25	18.785.000,00	3	1.775.000,00	2,37	-	-
2 18 01 1,09 06 UPTD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00		20	5.475.500,00	0	0,00	0	-	-
2 18 01 1,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00		0	0,00	0	0,00	0,00	-	-
2 18 01 1,09 09 UPTD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00		60	6.000.000,00	0	0,00	0,00	-	-
2 18 01 1,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.998.800,00		0	0,00	0	0,00	0,00	-	-
2 18 01 1,09 10 UPTD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00		25	5.000.000,00	0	0,00	0,00	-	-

2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	477.476.216,00		24	43.559.600,00	0	2.802.000,00	0,59		
2 18 02 1,01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	170.484.100,00		0	19.339.500,00	0	2.602.000,00	1,53		
2 18 02 1,01 01	Penetapan Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas /Insentif dan kemudahan penanaman Modal	45.294.500,00		0	8.505.800,00	0	1.086.000,00	2,40	-	-
2 18 02 1,01 02	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	125.189.600,00		0	10.833.700,00	0	1.516.000,00	1,21	-	-
2 18 02 1,02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	306.992.116,00		0	24.220.100,00	0	200.000,00	0,07		
2 18 02 1,02 01	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	306.992.116,00		0	24.220.100,00	0	200.000,00	0,07	-	-
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	266.526.700,00		0	17.968.800,00	0	0,00	0		
2 18 03 1,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	266.526.700,00		0	17.968.800,00	0	0,00	0		
2 18 03 1,01 01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	214.600.000,00		0	4.900.000,00	0,0	0,00	0	-	-
2 18 03 1,01 02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	51.926.700		0	13.068.800,00	0	0,00	0	-	-

2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	159.140.960,00		25	19.002.900,00	0	0,00	0		
2 18 04 1,01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25.995.700,00		0	6.000.000,00	0	0,00	0		
2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	16.000.000,00		0	4.000.000,00	0	0,00	0		
2.18.04.1.01.0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9.995.700,00		0	2.000.000,00	0	0,00	0		
2 18 04 1,02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	133.145.260,00		25	13.002.900,00	15,57	0,00	0		
2 18 04 1,02 0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	23.980.200,00		25	1.329.800,00	11	0	0		
2 18 04 1,02 0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	73.199.100,00		25	11.673.100,00	0	0	0		
2 18 04 1,02 0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	35.965.960,00		25	0,00	0	0,00	0		
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	975.999.700,00		0	106.650.000,00	0	74.339.800,00	7,62		

2 18 05 1,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	975.999.700,00		0	106.650.000,00	0	74.339.800,00	7,62		
2 18 05 1,01 0004	Pengawasan Penanaman Modal	526.000.000,00		23	46.250.000,00	46	39.300.600,00	7,47		
2 18 05 1,01 0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100.000.000,00		22	36.000.000,00	100	29.239.200	29,24		
2 18 05 1,01 0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	349.999.700,00		22	24.400.000,00	0	5.800.000,00	1,66		
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	25.952.800,00		25	6.000.000,00	0	2.535.000,00	0		
2 18 06 1,01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	25.952.800,00		25	6.000.000,00	0	2.535.000,00	0		
2 18 06 1,01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.952.800,00		25	6.000.000,00	0	2.535.000,00	0		
		13.554.136.615,00			4.061.690.729,00		2.764.601.144	20,40%		

Sumber : Data diolah

Berikut ini adalah capaian hasil dari masing – masing indikator kegiatan

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Program ini merupakan program untuk kegiatan rutin kantor dengan indikator nilai Sakip PD dan Survey kepuasan pelayanan internal.

Adapun uraian kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yakni :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 99.047.400,-. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Realisasi anggaran Triwulan I sebesar Rp.11.317,876,- atau 11,43% dan realisasi fisik sebesar 50%.

untuk mendukung kegiatan ini, telah ditetapkan sub kegiatannya, yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran induk Rp 91.088.900,-. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Renstra PD dan Renja PD. Realisasi anggaran sampai TW I Rp 11.317,876,- atau 11,43% dan realisasi fisiknya sebesar 45%. *Output* yang diharapkan dari sub kegiatan ini ada 11 dokumen yaitu Renja PD 2025, Renja PD Perubahan 2024, RKA 2025, RKPA 2024, DPA 2024, DPPA 2024 PK 2024, PK Perubahan, Sirup 2024, Sirup Perubahan 2024 dan IKU dalam I Tahun. Sampai TW I Dokumen yang telah diselesaikan ada 5 yaitu PK 2024, IKU, DPA 2024, Sirup 2024 (Sistem Rencana Umum Pengadaan) dan Renja 2025.
 - b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp 7.960.500,-. Pada Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah. Realisasi sub kegiatan ini masih 0,- Tetapi realisasi fisiknya sudah mencapai 57% dari target. Target dari sub kegiatan ini adalah 7 laporan kinerja. Sampai TW I evaluasi kinerja yg sudah dilaporkan sebanyak 4 laporan yaitu Dalev TW IV 2023, LPPD TA 2023, LKPJ TA 2023, LAKIP Tahun 2023.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.316.248.119,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah jumlah Laporan keuangan PD yang tepat waktu. Laporan Keuangan Tahun 2024 telah selesai disusun. Untuk mendukung kegiatan ini, ditetapkan sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran Rp. 8.316.248.119,-. Sampai dengan TW I realisasi keuangan sub kegiatan untuk pembayaran gaji dan Tunjangan ASN DPMPTSP ini sebesar Rp2.376.911.733,- atau 28,58% dan realisasi Fisik sebesar 25%.

3. kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 71.000.000,-. Keluaran kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian .

untuk mendukung kegiatan ini, sub kegiatan yang di jalankan adalah :

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran RP.71.000.000,-.Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 48 orang. Realisasi keuangan di TW I sub kegiatan ini sebesar Rp 1.000.000,- atau 1,41%. Dan realisasi fisik 2%, ,

4. kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 425.832.920,-. Keluaran kegiatan ini adalah Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (DPMPTSP). Realisasi kegiatan ini di TW I sebesar Rp 34.102.407,- atau 8,01%. Dan realisasi fisik 25%.

untuk mendukung kegiatan ini, sub kegiatan yang di jalankan adalah :

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran RP.49.230.100,-. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sebanyak 2 paket. Realisasi keuangan di TW I sub kegiatan ini sebesar Rp0,-.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran RP.29.997.100,-.Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia sebanyak 4 paket. Realisasi keuangan di TW I sub kegiatan ini sebesar 1 Paket, Realisasi keuangan di TW I sub kegiatan ini sebesar Rp 0
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran RP.14.992.200,-. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia sebanyak 12 paket. Realisasi keuangan di TW I sub kegiatan ini sebesar 0 paket, dengan pagu Rp 0,-.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran Rp24.999.100,-. Sampai dengan TW I realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp 0,-. keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik

kantor yang tersedia sebanyak 12 paket . Realisasi keuangan di TW I sub kegiatan ini sebesar 1 Paket , Realisasi keuangan di TW I sub kegiatan ini sebesar Rp 0

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 59.999.620,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp 0,- . Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang tersedia sebanyak 12 Paket.
 - g. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,-. Realisasi Keuangan TW I sebesar Rp,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan perundangan-undangan yang tersedia sebanyak 12 Dokumen. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp 0,- .
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan bahan/Material, dengan pagu anggaran Rp76.632.800,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp.0. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah paket bahan material yang tersedia seperti kertas, tinta dan ATK lainnya.
 - i. Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran Rp.57.500.000,-. Realisasi Keuangan TW I sebesar Rp.5.569.000,- atau sebesar 11,42% dan realisasi fisik sebesar 25%. Sub Kegiatan ini adalah penyediaan makan minum rapat dan tamu di DPMPTSP.
 - j. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran Rp 62.000.000,-. Realisasi Keuangan TW I sebesar Rp 27.533.407,- atau sebesar 44,41% dan realisasi fisik sebesar 25%. Keluaran sub kegiatan jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - k. Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD, dengan alokasi anggaran Rp 20.482.000,-. Realisasi Keuangan TW I sebesar Rp0,- atau sebesar 0% dan realisasi fisik sebesar 0%. Keluaran sub kegiatan jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD, sebanyak 1 Dokumen.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran Rp.797.533.100,-. Realisasi keuangan TW I kegiatan ini sebesar Rp,0-. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah BMD penunjang urusan PemerintahanYang Diadakan (DPMPTSP).

untuk mendukung kegiatan ini, sub kegiatan yang di jalankan adalah :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dengan pagu Anggaran Rp122.496.800,-. Realisasi Keuangan TW I kegiatan ini sebesar Rp,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan sebanyak 1 paket.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan pagu Anggaran Rp675.036.300,-. Realisasi Keuangan TW I kegiatan ini sebesar Rp,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran Rp.890.000.000,-. Realisasi keuangan TW I kegiatan ini sebesar Rp172.881.4430,- atau 19,42%. Realisasi fisiknya 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah (DPMPTSP).

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran tahun 2024 Rp15.000.000,-. Realisasi TW I keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp550.000,- atau sebesar 3,67% dari pagu anggaran. realisasi fisik sebesar 25%. Selama TW I, sudah melakukan pembelian benda pos, pengiriman barang/surat.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran tahun 2024 Rp175.000.000,-. Realisasi keuangan TW I sub kegiatan ini sebesar Rp 30.231.443,- atau 17,28% dengan realisasi fisik 25%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah untuk pembayaran listrik, telepon, kawat/faksimili/internet untuk 3 bulan.
 - c. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum kantor, dengan pagu anggaran Rp700.000.000,-. Realisasi keuangan TW I sub kegiatan ini sebesar Rp142.10.000,- atau 20,30% dengan realisasi fisik 25%. Selama TW I sub kegiatan ini telah melakukan belanja pembayaran Tenaga Harian Lepas sebanyak 25 orang untuk 3 bulan.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp.359.730.0800,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp 10.775.000,- atau 3% dan realisasi fisik 4%. Kegiatan ini ditunjang oleh 4 sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran Rp.64.850.000,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp 6.650.000,- atau 10,25% dan realisasi fisiknya 10% Keluaran sub kegiatan ini adalah

jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dengan target 1 unit. Sampai TW I sub kegiatan ini belum membelanjakan pengeluaran untuk biaya BBM kendaraan operasional dan servis kendaraan.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran Rp.69.962.000,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp.2.350.000,- atau 3,36% dan realisasi fisik 3%, Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya dengan target 3 unit dan Jumlah kendaraan yang dipelihara pada TW I sebanyak 1 unit.
- c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran Rp74.920.000,-. Realisasi keuangan TW I sub kegiatan ini Rp1.175.000 atau 2,37% dan realisasi fisiknya 3%,- Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya, dengan pagu anggaran Rp100.000.000,-. Realisasi keuangan TW I sub kegiatan ini Rp0,- Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi sebanyak 1 Unit
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp.49.998.8000,-. Realiasasi keuangan TW I sub kegiatan ini masih Rp0,- Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi.

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Program ini berkaitan dengan peningkatan kerjasama mitra kerja dengan investor. Indikator program ini adalah Banyaknya Investor yang menanamkan modal dengan target 23 Investor dengan pagu Rp.477.476.216,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp2.802.000,- atau 0,59% dan realisasi fisik 1% . Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Pagu anggaran tahun 2023 Rp.170.484.100,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp.2.602.000,- atau 1,53% dan realisasi fisik 2%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaku usaha yang

memperoleh fasilitas/insentif Provinsi dengan target 2 Pelaku Usaha.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- a. Sub kegiatan Penetapan kebijakan Daerah dalam pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan pagu anggaran Rp Rp.45.294.500,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp.1.086.000,- atau 2,40% dan realisasi fisiknya 3%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan target 1 Dokumen.
 - b. Sub kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan pagu anggaran Rp 125.189.600,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp.1.516.000,- atau 1,21% dan realisasi fisiknya 2%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Kesepakatan Kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah targetnya sebanyak 2 Dokumen.
2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi. Pagu kegiatan ini tahun 2024 adalah Rp.306.992.116,-. Realisasi Keuangan TW I sebesar Rp0,-. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah peta Peluang investasi Provinsi sebanyak 1Dokumen.
- Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan pagu anggaran Rp.306.992.116,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen peta Potensi investasi Provinsi sebanyak 1Dokumen. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp200.000,-. atau 0,07% dan realisasi fisiknya 0,07%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi dengan pagu anggaran Rp. 306.992.116,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen peta potensi investasi sebanyak 1 Dokumen. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp 200.000,-. atau 0,07% dan realisasi fisiknya 0,07%

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program ini bertujuan untuk mengundang investor menanamkan modalnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pagu induk program ini adalah Rp.266.526.700,-. Indikator program ini adalah Jumlah Peluang Penanaman Modal yang dipromosikan dengan target 2 Peluang. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp0,- Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Pagu induk anggaran kegiatan ini Rp.266.526.700,- Realisasi keuangan TW I sebesar Rp 0,- . Keluaran dari kegiatan ini adalah

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebanyak 2 Promosi

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dengan pagu anggaran Rp.214.600.000,-. Realisasi keuangan TW I sub kegiatan ini Rp 0,-. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil Kegiatan promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen.
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi dengan pagu Rp.51.926.700,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp0,- Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Strategi promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi sebanyak 2 dokumen.

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program ini terkait dengan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPSTP. Keluaran program ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang Terlayani dengan target 950 Pelaku Usaha. Pagu program ini sebesar Rp.159.140.960,-. Realisasi keuangan program ini TW I adalah Rp.0, Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik. Target kegiatan ini 50 Izin dan Non Perizinan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.25.995.700,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp0,-. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dengan pagu anggaran Rp16.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik sebanyak 50 Pelaku Usaha.
 - b. Sub Kegiatan Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Pagu Anggaran Rp.9.995.700,-. Keluaran sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas daerah Kabupaen/Kota bagi pelaku usaha dengan target

50 Kegiatan Pelaku Usaha

2. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.133.145.260,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp.0,-

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan pagu anggaran Rp.23.980.200,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui system Perizinan Berusaha Berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan target 900 Pelaku Usaha. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp 0,- atau Sampai TW I jumlah Izin dan Non Perizinan yang dikeluarkan sebanyak 144 (*sampai Bulan Februari*) izin atau 15,57% dari target.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan pagu anggaran Rp 73.199.100,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Tersediannya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan target 925 Izin dan Non Izin. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp 0,- Sampai TW I jumlah Izin dan Non Perizinan yang dikeluarkan sebanyak 144 izin atau 15,57% dari target.
- c. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Pagu anggaran Rp.35.965.960,-.Keluaran Sub Evaluasi , dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/ kota bagi kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha dengan target 925Izin dan Non Izin. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp0,.

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMANMODAL

Program ini terkait dengan pengawasan perusahaan yang izinnya telah dikeluarkan oleh Provinsi. Keluaran program ini adalah Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian

kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha .Persentase Peningkatan Perusahaan yang Patuh terhadap Perundang-undangan dengan target 1,1%. Pagu Anggaran sebesar Rp 975.999.700,-. Realisasi keuangan Program ini pada TW I adalah Rp74.339.800,- atau 7,62% Realisasi fisiknya 8%,. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Rp 975.999.700,-. Keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha dengan target sebanyak 106 PU dan KU. Realisasi keuangan sampai TW IV adalah Rp74.339.800,- atau 7,62% Realisasi fisiknya 8%,.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dengan pagu anggaran Rp526.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi Data, profil dan informasi kegiatan usaha dan pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha dengan target 13 Kegiatan Usaha sudah terealisasi sebanyak 6 Kegiatan Usaha. Realisasi keuangan pada TW I adalah Rp 39.300.600,- atau 7,47 % realisasi fisiknya 46%.
- b. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya dengan pagu anggaran Rp 100.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya dengan target 18 kegiatan usaha realisasi 18 kegiatan Usaha. Realisasi keuangan pada TW I adalah Rp 29.239.200,-, atau 29,24% dan fisiknya 29%.
- c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dengan pagu anggaran Rp.349.999.700,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan target 275 Pelaku Usaha. Realisasi keuangan pada TW I adalah Rp 5.800.000,-, atau 1,66% dan fisiknya 2%.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program berkaitan dengan data informasi perizinan dan non perizinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran dari program ini adalah Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola Pagu program ini Rp 25.952.800,-. Realisasi keuangan Program ini pada TW I adalah Rp 2.535.000,- atau 9,77% dan realisasi fisiknya 10%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi. Pagu kegiatan ini Rp 25.952.800,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan yang terintegrasi sebanyak 1 dokumen. Pada dengan TW I realisasi keuangan sebesar Rp.2.535.000,- atau 9,77% dan realisasi fisiknya 10%.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

- a. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan pagu Rp 25.952.800,-. Keluaran dari kegiatan ini adaalah jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan sebanyak 12 dokumen. Pada TW I realisasi keuangan sebesar Rp.2.535.000,- atau 9,77% dan realisasi fisiknya 10%.

Agar pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Belitung dapat terlayani dengan cepat dan baik maka dibentuklah UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) wilayah Belitung. Untuk mendukung hal tersebut, maka disiapkan anggaran untuk operasional UPT PPT Wilayah Belitung.

VII.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Untuk menunjang pelayanan di UPT PPT wilayah Belitung maka dianggarkan Program ini yang merupakan program untuk kegiatan rutin dengan indikator nilai Sakip PD dan Indeks kepuasan pelayanan internal. Pagu anggaran untuk UPT pada program penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Rp 689.647.900,-. Realisasi keuangan pada TW I sebesar Rp 77.934.885,- atau 11% dan realisasi fisik sebesar 12%.

Kegiatan yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di UPT PPT wilayah Belitung adalah :

1. kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 120.455.100,-. Keluaran kegiatan ini adalah indeks Kepuasan Pelayanan

Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PPT wilayah Belitung). Realisasi kegiatan ini di TW I sebesar Rp.5.145.671,- atau 4%. Dan realisasi fisik 5%.

Untuk mendukung kegiatan ini, sub kegiatan yang di jalankan adalah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran Rp12.999.600,-. Keluaran Sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen Listrik yang Disediakan dengan target 4 Paket. Realisasi keuangan di TW I sub kegiatan ini sebesar Rp0,-.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp14.999.200,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 4 Paket. Realisasi keuangan di TW I sub kegiatan ini sebesar Rp.0,- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran Rp15.000.000,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan dengan target 6 Paket. Realisasi keuangan di TW I sub kegiatan ini sebesar 0,- .
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran Rp3.997.200,-. Pada TW I realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar 0,-. keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Dengan target sebanyak 12 Paket.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan pagu anggran sebesar Rp19.999.600,-. Pada TW I realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 12 Paket.
- e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.960.000,-. Pada TW I realisasi Keuangan sebesar Rp760.000,- atau sebesar 15% dan realisasi fisik sebesar 17%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan perundangan-undangan yang tersedia sebanyak 12 Dokumen. Di TW I telah membayar tagihan surat kabar.
- f. Sub Kegiatan Penyediaan bahan/Material, dengan pagu anggaran Rp14.999.500,-. Pada TW I realisasi keuangan sebesar Rp,-. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah paket bahan /material yang disediakan UPT PPT Wilayah Belitung sebanyak 4 Paket.
- g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran Rp 17.500.000,-. Pada dengan TW I realisasi Keuangan sebesar Rp.2.475.000,-

- c. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum kantor, dengan pagu anggaran Rp263.900.000,-. Pada TW I realisasi keuangan sub kegiatan ini sebesar Rp60.900.000,- atau 23% dengan realisasi fisik 25%. Pada TW I kegiatan ini telah melakukan belanja pembayaran Tenaga Harian Lepas UPT sebanyak 7 orang untuk TW I.
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah UPT PPT wilayah Belitung dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp121.600.000,-. Realisasi keuangan TW I sebesar Rp5.750.714,- atau 5% dan realisasi fisiknya 10% Kegiatan ini ditunjang oleh sub kegiatan :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan, dengan Pagu anggaran Rp 13.000.000,-. Pada TW I realisasi keuangan sebesar Rp0,-. Keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan, dengan pagu anggaran Rp 68.600.000,-. Pada TW I realisasi keuangan sebesar Rp5.750.714,- atau sebesar 8% dengan realisasi fisik 100%. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Sampai TW I sub kegiatan ini telah membelanjakan pengeluaran untuk biaya BBM kendaraan operasional dan servis kendaraan sebanyak 2 unit .
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran Rp10.000.000,-. Sampai Tw I Realisasi keuangan sebesar Rp0,-.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya, dengan pagu anggaran Rp10.000.000,-. Sampai TW IV realisasi keuangan sub kegiatan ini Rp0,-.
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya, dengan pagu anggaran Rp.20.000.000,-. Sampai TW IV realisasi keuangan sub kegiatan ini Rp0,-.

BAB III

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

3.1. Kendala

Secara umum dalam Triwulan I belum banyak terdapat kendala yang dihadapi. Semua anggaran kegiatan sudah dijadwalkan sesuai dengan rencana kegiatannya.

Didalam pelaksanaan kegiatan di UPTD Pelayanan Perizinan Terpadu Wilayah Belitung ada beberapa kendala dan hambatan diantaranya :

1. Harga standar disistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku yang dimana harga berbeda mengikuti tempat atau daerah masing-masing.
2. Dalam Pelaksanaan belanja tahun anggaran 2024 menggunakan aplikasi belanja online sementara untuk penyediaan di kabupaten belum memenuhi syarat dan belum siap untuk menggunakan aplikasi online.

3.2. Tindak Lanjut

Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut yang dilakukan adalah :

- Melakukan koordinasi dengan pengampu kegiatan di DPMPTSP.
- Melakukan koordinasi dengan Bakuda khususnya bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam penerbitan DPPA.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Evaluasi hasil renja PD dilakukan setiap triwulan, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
2. Realisasi Belanja DPMPTSP termasuk UPT PPT wilayah Belitung sebesar Rp.2.764.601.144,- atau sebesar 20,40%. Untuk izin yang telah dikeluarkan adalah sebanyak 144 (*sampai bulan Februari*) Izin dan non perizinan atau 15,57% dari target;
3. Dalam rapat evaluasi TW I Kepala Dinas mengharapkan tiap bidang, Sekretariat dan UPT agar lebih maksimal dalam menjalani kegiatan di Triwulan selanjutnya.